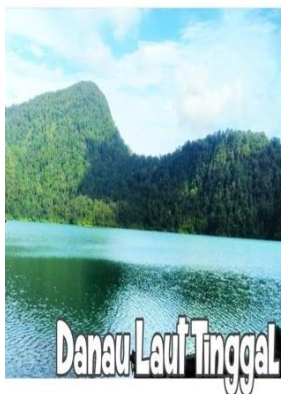




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERTANIAN PADANG TUJUH



Danau Laut Tinggal



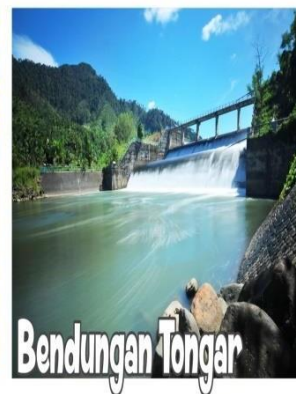
Suak Maligi



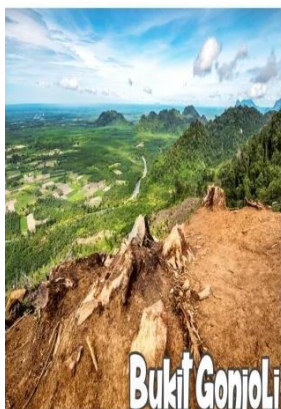
Air Terjun Siburai Burai



Sipagogo



Bendungan Tongar



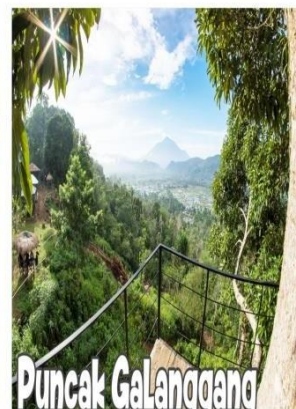
Bukit Gonjoli



Pulau Pigago



Puncak Talamau



Puncak Galanggang



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN), perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi dan diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pariwisata tahun 2022. Akhir kata, semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan terima kasih.

Padang Tujuh, Januari 2023
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Pasaman Barat



DECKY HARMIKO SAPUTRA, SH
Pembina / IV a
NIP. 19760430 199511 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) .

Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 4 (Empat) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini, Segala keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Padang Tujuh, Januari 2023
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Pasaman Barat



DECKY HARMIKO SAPUTRA, SH
Pembina / IV a
NIP. 19760430 199511 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif efisien akuntabel dan transparan sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan pertanggungjawaban yang akuntabel, jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tentunya sangat bermanfaat sebagai:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kabupaten Pasaman Barat di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348). Sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.

Pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata. Dinas

Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 80 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub bagian yaitu
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Destinasi Pariwisata
 - Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - Seksi Penataan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Bidang Objek, Daya Tarik dan Atraksi
 - Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
 - Seksi Seni, Hiburan, dan Atraksi Wisata
 - c. Bidang Pengembangan SDM, Usaha Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
 - Seksi Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata
 - Seksi Ekonomi Kreatif
 - d. Bidang Promosi dan Pelayanan Data
 - Seksi Promosi Pariwisata
 - Seksi Data, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, organisasi Dinas Pariwisata sebagai berikut :

•	Kepala Dinas Pariwisata	:	DECKY HARMIKO SAPUTRA, SH
•	Sekretaris Dinas Pariwisata	:	RIZA AMELIA, S.KM.M.Kes
•	Kepala Bidang Objek,Daya Tarik Dan Atraksi	:	DESYARTI S. SH., MH
•	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	:	ROSIDI, S.H
•	Kepala Bidang Promosi Dan Pelayanan Data	:	MARTHA YANI, ST
•	Kepala Bidang Pengembangan SDM,Usaha Pariwisata & Ekonomi Kreatif	:	SAHDAN, SH
•	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	:	FENITA RAHIM, SKM
•	Kasubag Keuangan	:	LUSI MERFADONA,SH
•	Kasubag Program dan Pelaporan	:	EKSI RIMAYANI, ST
•	Kasi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	:	-
•	Seksi Seni,Hiburan Dan Antraksi Wisata	:	ADRIANSYAH, A.Md
•	Seksi Data Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	:	-
•	Seksi Promosi Dan Dokumentasi	:	DIAN APRIANI S.Sos
•	Kasi Penataan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	:	-
•	Seksi Sarana Prasarana Pariwisata	:	ROBI ZANDRIKO,SE
•	Seksi Pengembangan sdm Dan Usaha Pariwisata	:	
•	Kasi Ekonomi Kreatif	:	ZUL ATISKA, S.ST

1.3.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat

menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata.

b. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Rencana Strategis 2021-2026

Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ini visi jangka menengah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 – 2026 adalah :

“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Agamais, Maju dan Sejahtera diukur dengan:

1. Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Terwujudnya masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai adat budaya
3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
5. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
6. Peningkatan kedaulatan pangan
7. Meningkatnya konektivitas wilayah
8. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana
9. Terciptanya lingkungan hidup berkualitas
10. Pengendalian pemanfaatan ruang

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

**Tabel 1. 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021 – 2026**

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	1. Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing	1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	1. Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa
		2. Diamalkannya ajaran agama dan nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat
		3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		5. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	1. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	1. Pengentasan kemiskinan dan Penanganan Stunting
		2. Perluasan peluang pekerjaan
		3. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Terkait dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tugas dan fungsi OPD Dinas Pariwisata terdapat pada misi ketiga yakni Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional, dan global. Misi ketiga memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan

pemerataan pendapatan dimana Dinas Pariwisata berada pada sasaran kedua yakni Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor strategis. Salah satu sektor strategis di Kabupaten Pasaman Barat adalah sektor pariwisata.

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan
2. Merumuskan kebijakan peningkatan mutu sarana prasarana wisata
3. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Kabupaten di Bidang Pariwisata
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang kepariwisataan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai, terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Pasaman Barat itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Lokasi objek wisata banyak berada di kawasan hutan lindung dan di kuasai oleh masyarakat.

Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat belum dapat dikelola secara optimal, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta karena disebabkan objek wisata banyak berada di kawasan hutan lindung serta di kuasai oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait serta sosialisasi kepada masyarakat.

3. Rendahnya Aksesibilitas Menuju ke Obyek Wisata.

Secara umum kualitas jalan di Kabupaten Pasaman Barat sudah baik, tetapi aksesibilitas menuju destinasi tertentu masih harus difokuskan lagi sehingga dibutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat .

4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dari 61 Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, yang tersentuh pembangunan sarana dan prasarana baru 17 destinasi wisata. Maka dapat disampaikan bahwa lebih kurang 28 % yang baru tersentuh, dan untuk target pencapaian pembangunan sarana dan prasarana dibutuhkan 72 % yang direncanakan lima tahun ke depan .

5. Belum terbina dan tertatanya usaha ekonomi kreatif di destinasi Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk meningkatkan pendapatan (income) masyarakat di kawasan wisata dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan masyarakat setempat untuk mengelola dan menata kegiatan usaha ekonomi kreatif , sehingga lima tahun kedepan diharapkan tercapainya target PAD Kabupaten Pasaman Barat.

6. Kurangnya dokumen dalam pengambilan kebijakan sebagai arahan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat.

Perlu penataan kelengkapan dokumentasi, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Pasaman Barat. Serta harus ada pelatihan kepada *stakeholder* kepariwisataan untuk kegiatan penataan dan pengembangan destinasi.

7. Rendahnya Daya Saing Usaha Kepariwisataan. Daya saing usaha pariwisata Kabupaten Pasaman Barat rendah, hal ini menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata, Promosi dan pemasaran. Sehingga memberikan implikasi pada pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menyediakan lebih banyak event atau *atraksi* pariwisata akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

8. Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata.

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ternyata banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal dalam penyajiannya.

9. Kurangnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi Diantara OPD Terkait.

Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, untuk mewujudkan percepatan dalam penyusunan Program (Program bersama) bidang kepariwisataan antar OPD Kabupaten Pasaman Barat. Dalam Meningkatkan pembinaan sarana prasarana objek wisata dibutukan kerja sama antar SKPD dan diawasi oleh tim percepatan pembangunan destinasi wisata yang dibentuk oleh PEMDA.

1.5 Sumber Daya Dinas Manusia

Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman barat sebanyak 43 orang yang terdiri dari ASN ,Tenaga Non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. JUMLAH PEGAWAI DINAS PARIWISATA KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	PEGAWAI	JUMLAH(ORANG)
1.	ASN	17
2.	CPNS	2
3.	Non ASN	28
	JUMLAH	47

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pariwisata masih ada yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara yaitu tenaga Non ASN . Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada

ASN dan CPNS sebanyak 19 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	1
4	Fungsional	6
5	Staf	6
	Jumlah	19

b. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata menurut golongan

N0	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	8
2.	III	10
3.	II	1
	Jumlah	19

c. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata-2 (S2)	2
2.	Strata-1 (S1)	14
3.	Sarjana Terapan (D4)	1
4.	Sarjana Muda/ D3	1
5,	SLTA/SMK	1
	Jumlah	19

d. Jumlah Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Sarana/Prasarana	Jumlah Yang Dibutuhkan	Jumlah yang tersedia
	Alat-alat Besar		
	Portable Generating Set		1
	Electric Generating Set Lain-lain		1
	Alat-alat Angkutan		
	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain		4
	Sepeda Motor		8
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain		7
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)		2
	Mesin Ketik Elektronik		1
	Rak Kayu	1	1
	Filling Besi/Metal		9
	Papan Nama Instansi		5
	Papan Pengumuman		1
	White Board		1
	Overhead Projektor		1
	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)		2
	Lemari Kayu		2
	Kursi Besi/Metal		4
	Lemari Es		2
	AC Unit		2
	Televisi		2
	Sound System		4
	Karaoke		1
	Dispenser		5
	Handy Cam		3
	Alat Rumah Tangga Lain-lain		17

Alat Pemadam Portable	1
Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2
P.C Unit	13
Lap Top	5
Note Book	2
Printer	2
Printer	11
Peralatan Jaringan Lain-lain	3
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	7
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12
Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
Meja Rapat Pejabat Eselon II	2
Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10
Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	53
Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	30
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3
Buffet Kayu	1
Buffet Kaca	1
Alat Studio dan Alat Komunikasi	
Proyektor + Attachment	1
Audio Monitor Active	1
Compact Disc. Player	1
Peralatan studio Visual Lain-lain	1
Camera Electronic	4
Lensa Kamera	1

	Sound System		1
	Pesawat Telephone		1
	Handy Talky		4
	Faxmili		1
	Wireless Amplifier		1
	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain		4
			1

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pariwisata sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan Bidang Pariwisata telah menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan pada tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata
Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.Meningkatkan Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,68	0,70	0,72	0,73	0,75	0,78	0,78
	1.Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	225.200	247.720	272.492	313.365	360.365	414.419	414.419
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,87	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8
	2.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	14%	15%	16%	17%	18%	20%	20%
2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata		Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB

		Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3
		Persentase Penurunan Temuan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100 %	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Peningkatan nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3
		Persentase Penurunan Temuan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100 %	100%

Rencana kinerja akan menjadi tolok ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan Dinas Pariwisata selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dengan kepala daerah menjadi pengikat dan pengingat atas komitmen Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dengan Bupati tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2.Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatnya daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	247.720
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	1,2 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan sub sektor Ekonomi Kreatif	15%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Peningkatan Nilai SAKIP	B
		Level Maturitas SPIP	2
		Persentase Penurunan Temuan BPK	80%

Begitu juga dalam mendukung sasaran strategis yang menjadi target kinerja eselon II, maka eselon III membuat perjanjian kinerja sebagai komitmen yang mengikat antara eselon III dengan eselon II, begitu juga eselon IV dengan eselon III.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV dengan Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2022

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sekretaris			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	%	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata	Unit	438
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan	%	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan	%	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	%	100
Bidang Destinasi			
Kegiatan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Kawasan Geopark	1
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang telah dibangun di destinasi wisata	Unit	41

Bidang Promosi			
Pemasara Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Promosi	5
Bidang Atraksi			
Pemasara Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Promosi	5
Bidang SDM dan Ekonomi Kreatif			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang handal	%	34

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA OPD Dinas Pariwisata Tahun Anggaran Awal 2022 sebesar Rp. 4.689.289.077,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.937.759.077 dan Belanja Modal Rp 751.530.000,- dan Anggaran Dinas Pariwisata setelah perubahan sebesar Rp. 5.466.015.258,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4.353.733.065,- dan Belanja Modal Rp 1.112.282.193,-.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	orang	247.720	395.913	159,82,2%	Tercapai
2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,2	0,207	17,3%	Tidak Tercapai
3. Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha ekonomi kreatif	%	15	16,6	110,6%	Tercapai
4. 1. Peningkatan Nilai Sakip 2. Level Maturitas SPIP 3. Persentase Penurunan Temuan BPK	Level %	B 2 80	B 2 93	100% 100% 116,25%	Tercapai

Tabel 3.1 menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 yang secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Ada 3 indikator kinerja untuk tahun 2022 yang telah memenuhi target, sementara ada 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah telah memisahkan pajak rumah makan/ restoran dihitung secara terpisah dengan pajak makan minum sesuai Pph 1 dan Pph pasal 23 sehingga pada tahun 2022 PAD sektor Pariwisata Rp 241.093.738 sedangkan PAD sektor Pariwisata tahun 2021 sebesar Rp 1.214.239.346

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Eselon III Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Sekretaris					
Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	%	100	100	100 %	Tercapai
Persentase realisasi keuangan	%	100	100	100 %	Tercapai
Jumlah barang milik daerah yang dikelola Dinas Pariwisata	Unit	438	438	100 %	Tercapai
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100 %	Tercapai
Persentase pengadaan	%	100	100	100 %	Tercapai
Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan	%	100	100	100 %	Tercapai
Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	%	100	100	100%	Tercapai
Bidang : : Destinasi Pariwisata					
Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Kawasan Geopark	1	1	100 %	Tercapai
Jumlah sarana dan prasarana yang telah	unit	41	42	102 %	Tercapai

dibangun di destinasi wisata					
Bidang : Promosi dan Pelayanan Data					
Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	promosi	5	5	100%	Tercapai
Bidang : Objek, Daya Tarik dan Atraksi					
Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	promosi	5	5	100%	Tercapai
Bidang : Pengembangan SDM, Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia pariwisata yang handal	%	34	37	108%	Tercapai

Tabel 3.2 menunjukkan capaian kinerja pejabat eselon III Dinas Pariwisata Tahun 2022 secara keseluruhan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja eselon III sebagai pelaksanaan target kinerja yang telah disepakati antara pejabat eselon III dengan Kepala Dinas Pariwisata. Sekretariat dengan indikator sasaran non IKU, semua indikator terealisasi 100%. Pada Bidang Destinasi Pariwisata kegiatan mencapai target 100%, bahkan ada yang melampaui target yaitu pembangunan sarana prasarana pariwisata dimana pada anggaran perubahan dialokasikan penambahan dana untuk pembangunan amenitas pariwisata. Bidang Promosi Pariwisata dan Bidang Atraksi tercapai 100% dimana promosi pariwisata telah dilakukan baik melalui media cetak dan elektronik, terutama di media online seperti facebook, Instagram dan juga Dispar Chanel yang meliput setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Even pada tahun 2022 juga terlaksana dengan sukses diantaranya :

- 1) Pentas Seni dan Budaya Bulan Juni s/d September
- 2) Zero Waste Mountain Talamau Pada Agustus 2022
- 3) Lomba Antar Pelajar se Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Agustus 2022 pada agustus 2022
- 4) Pengibaran Bendera Merah Putih di Udara, sekaligus di Puncak Gunung Talamau dan Dasar laut Air Bangis Pada Agustus 2022
- 5) Fun Bike Adventure di Bukit Marando Pada Desember 2022
- 6) Kerjasama dengan Komunitas

- a). SKIN
- b). Motorcross
- c). Camper van
- e). Kopdar DFIN

Bidang SDM Pariwisata mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan banyaknya pelatihan yang dilakukan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata Pasaman Barat sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan terhadap ekonomi kreatif.

- Pelatihan kelompok Sadar wisata (Pokdarwis)

Pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama dengan Topik “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata se Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan di Puncak Galanggang. Pelatihan kedua dengan topik “Workshop Peningkatan Kapasitas Pokdarwis dalam Promosi Wisata berbasis digital se Kabupaten Pasaman Barat”, yang dilaksanakan di Batang Kanian Nagari Rabijonggor. Masing masing kegiatan dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta pada setiap pertemuan sebanyak 30 orang yang berasal dari Pokdarwis. Materi yang diberikan adalah peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk pengembangan Kepariwisata. Narasumber berasal dari Propinsi yang merupakan pelaku usaha pariwisata Propinsi Sumatera Barat (Dewisnu), dan Perguruan tinggi yang terkait dengan kepariwisataan (UNP), Anggaran berasal dari APBD Dinas Pariwisata. Sampai dengan tahun 2022, sudah terbentuk 23 Pokdarwis yang ada di Pasaman Barat, 5 diantaranya dibentuk pada tahun 2022, 10 dibentuk pada tahun 2021 dan 8 terbentuk pada tahun 2020. Pasaman Barat mempunyai 76 Destinasi wisata, diharapkan seluruh destinasi dapat dikelola oleh pokdarwis, bekerjasama dengan nagari yang pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, entrepreneur baru seperti yang diharapkan.

- Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif

Pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 kali :

- 1). Pelatihan untuk pelaku usaha ekonomi kreatif Pasaman Barat

Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari pelaku ekonomi kreatif berbagai sub sektor, dilaksanakan selama 3 hari dan bertempat di Pulau Panjang (Air Bangis). Materi yang disampaikan pada pertemuan ini antara lain

: membangun Branding, Pengemasan, Foto produk dll.

2). Workshop Pengembangan Produk Lokal (Lidi Sawit) berbasis inovasi pada sub sektor kriya

Banyaknya kebun sawit di Kabupaten Pasaman Barat, menjadikan Pasaman Barat kaya akan lidi Sawit, namun belum di Manfaatkan secara maksimal, untuk itu pada pelatihan ini pelaku ekonomi kreatif dilatih untuk memanfaatkan lidi sawit menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomis. Kegiatan dilaksanakan di Kinali, dan peserta juga berasal dari nagari Kinali. Peserta berjumlah 30 orang, anggaran bersumber dari APBD Dinas Pariwisata. Berdasarkan informasi yang didapat pada Desember ini, produk yang dibuat sudah mendapatkan pasar yang baik, sehingga ada permintaan pelatihan serupa di Jorong Lubuak Landua. Diharapkan tersedia anggaran yang cukup untuk pelatihan pengembangan produk lokal seperti ini, mengingat masih banyak produk lokal yang belum termanfaatkan, seperti tongkol jagung dll.

3). Peningkatan Kapasitas pelaku usaha pariwisata di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

Peserta pelatihan ini adalah pengelola rumah makan dan café yang ada di kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dengan tema Verifikasi Izin Berusaha Berbasis Risiko. Pada saat pelatihan ini pengelola rumah makan dan café yang berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie langsung mendaftarkan usahanya melalui aplikasi OSS, dan lulus verifikasi sebanyak 17 usaha. Bagi pengelola Usaha Pariwisata, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memudahkan mereka dalam pengurusan izin.

- Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Pasaman Barat

Pelatihan pengelolaan Desa Wisata, diikuti oleh Ketua Pokdarwis, Bamus, Ketua LKAAM, dan tokoh masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari. Kegiatan ini bertujuan agar Nagari, Bamus dan Pokdarwis bekerjasama untuk meningkatkan kepariwisataan di wilayahnya, sampai dengan cara membuat paket wisata. Dana berasal dari Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022. Seluruh Kegiatan yang sudah dilaksanakan dikoordinir oleh Pokdarwis setempat, sehingga pokdarwis mempunyai pengalaman dalam mengelola event/kegiatan karena Pokdarwis merupakan salah satu wadah untuk membentuk enterpreuner baru.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Eselon IV Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	Seksi Sarana Prasarana Pariwisata				
	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Tidak Tercapai
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit	100%	Tercapai
2	Seksi Promosi dan Dokumentasi				
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
3	Seksi Seni dan Atraksi				
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tercapai
4	Seksi SDM dan Ekonomi Kreatif				
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	90 Orang	90 Orang	100%	Tercapai
	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	60 Orang	60 Orang	100%	Tercapai
5	Kasubag Umum				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tercapai

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tercapai
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	28 Kali	112%	Tercapai
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7 Unit	87,5%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tercapai
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%	Tercapai
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	100%	Tercapai
6	Kasubag Keuangan				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	19 Orang	100%	Tercapai
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tercapai

7	Kasubag Program dan Perencanaan				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tercapai
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tercapai
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	28 Kali	112%	Tercapai
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7 Unit	87,5%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tercapai
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tercapai
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100%	Tercapai
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	100%	Tercapai

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk eselon IV pada Dinas Pariwisata telah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator ada yang melebihi target yang ditetapkan, namun ada satu indikator yang tidak mencapai target yaitu dokumen kawasan strategis Dinas Pariwisata yaitu Dokumen Rencana Induk Geopark dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang batal dilaksanakan. Hal ini disebabkan lamanya proses lelang di BLP sehingga waktu untuk penyusunan dokumen tersebut tidak cukup sampai akhir tahun 2022, sehingga diputuskan untuk membatalkan proses pengadaan.

3.2. Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2022

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di sektor pariwisata, tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan progam/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah kawasan Geopark yang ditetapkan	Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata			
2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di destinasi wisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	740.714.050	189.798.750	26
3	Persentase peningkatan sub sektor Ekonomi Kreatif			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	213.729.863	210.311.113	98
		1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Program pengembangan pemasaran Pariwisata			
				Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	537.493.150	507.566.900	96
		Persentase kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang handal	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	339.229.750	314.864.100	93

				Dasar			
4	1. Peningkatan Nilai Sakip 2. Level Maturitas SPIP. 3. Opini terhadap laporan keuangan OPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Persentase Realisasi Keuangan	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.834.060.105	2.502.060.685	88
			Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	15.850.000	15.850.000	100
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Adminitrasi umum perangkat daerah	266.450.510	266.222.763	99
			Persentase pengadaan	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	51.411.080	50.059.000	97
			Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48.059.250	46.177.100	96

			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	419.017.500	395.782.800	94
--	--	--	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	----

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian kinerja strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebanyak 6 indikator kinerja dengan 3 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Dari uraian berikut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (*performance plan*) sebanyak 10 indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “sangat baik” atau sebesar 99% - 100 % sebanyak 2 indikator kinerja.
- Terlaksana dengan “baik” atau 80% - 95 % sebanyak 7 indikator kinerja.
- Terlaksana dengan “kurang” sebanyak 1 indikator kinerja

Secara umum kinerja Dinas Pariwisata menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian realisasi kinerja sebesar 88,7%, realisasi ini jika dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan karna terdapat 1 indikator dengan kondisi kurang yaitu 26% pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota . Hal ini disebabkan batalnya pengadaan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dan Dokumen Rencana Induk Geopark (RIG) Jika dilihat capaian tiap sasaran dari 10 (sepuluh) indikator kinerja pada umumnya 9 indikator mencapai target.

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan
2. Pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terjadi batalnya pengadaan Dokumen RIPPARDA dan RIG. Hal ini disebabkan karena lamanya proses pengadaan di BLP sehingga dalam dokumen kontrak tidak mencukupi lamanya proses pembuatan dokumen sampai akhir tahun 2022.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat di pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang terjadi saat ini yaitu dengan :

1. Mempercepat proses pengesahan RAPBD menjadi APBD
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran
3. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap sektor ekonomi kreatif serta kelompok sadar wisata sehingga terjadi perkembangan dari industri kreatif dan SDM Pariwisata.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dengan banyaknya pemandu wisata yang bersertifikat dapat dibuat paket wisata destinasi Pasaman Barat.

5. Mengadakan rekrutmen sarjana kepariwisataan yang bisa membuka jaringan kepariwisataan dengan investor baru, sehingga promosi destinasi wisata Pasaman Barat bisa meningkat
6. Memunculkan daya tarik tersendiri untuk destinasi wisata Pasaman Barat, agar wisatawan betah berkunjung ke Pasaman Barat dan secara bertahap dibangun amenitas (fasilitas umum seperti WC/Toilet, Parkir, Tempat Ibadah, kawasan pedestrian) pada destinasi wisata Pasaman Barat, sehingga terjadi peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan yang pada akan meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
8. Meningkatkan ketelitian dalam menyusun anggaran kegiatan, sehingga terjadi kesesuaian antara kegiatan yang butuh dilaksanakan dengan yang dianggarkan pada DPA serta kesesuaian indikator kinerja untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

BAB IV. PENUTUP

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 merupakan arah dan tolok ukur kinerja menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pariwisata yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat tercapai dan bahkan melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Tentunya kedepan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diminimalisir, sehingga Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perencanaan pariwisata mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan mampu menjembatani tujuan pembangunan daerah dalam